KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BIMA DALAM BINGKAI BUDAYA PATRIARKI

Oleh:

Zuhrah

zhoemachy@gmail.com

Dosen STIH Muhammadiyah Bima

Abstract:

The important in this research is to solve the main factor of violent in household. The research will focus on the perspective of patriarchy culture in Bima. The style of research is field research, researcher be on the field directly, he interview the objects or stakeholders who ever known about the case of violent in household. The sample is taken by using purposive sampling method, and the technique of collect data are using observation, interview, documentation and study literature. Based on the result of research, the case of violent in household in Bima District are more than in Bima City. While the data at Bima City during 2014-2015 only 17% than data at Bima District. The case of violent in household which written at Religious Court are more effected by noting care about household. There are husbands who has not the permanent job, while their wife does not want to help her husband to get job, so they get more income. The violent in household at Bima sometime it be happen to wife or children.

Keywords: *Violent, Household, Culture, Patriarchy.*

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bukanlah fenomena baru bagi masyarakat, hanya saja fenomena ini pada saat belum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maka persoalan ini tidak diangkat ke ranah hukum. Juga sebagian dari pemikiran masyarakat Bima khususnya, bahwa masalah keluarga (KDRT) merupakan aib bagi keluarga apabila diketahui orang lain.

Setelah lahirnya undang-undang PKDRT ini, maka mulai bermunculan laporan-laporan tentang adanya kasus penganiayaan secara fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau isteri kepada pasangannya sehingga pada akhirnya dilanjutkan pada proses hukum. Hal ini dianggap sebagai peraturan yang akan membuat jera para pelaku penganiayaan, baik secara fisik maupun psikis serta penelantaran terhadap rumah tangga.

Akan tetapi, visi misi ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat pada umumnya yang diwakili oleh pihak legislator dalam

~~kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:~~
*Penulis adalah Dosen Tetap di STIH Muhammadiyah Bima

yang melaporkan ke pihak kepolisian bahwa ada. Hal ini juga mengindikasikan bahwa individu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak sadar hukum atau bisa saja kurangnya sosialisasi *stakeholder* pada keluarga yang ada.

Di sisi lain, budaya di Bima yang bersifat patriarki masih melekat pada paradigma masyarakat sehingga perempuan atau isteri yang melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian dianggap sebagai perempuan yang durhaka pada suaminya. Pada titik inilah perempuan atau isteri harus mempertimbangkan niatnya untuk melaporkan sang suami. Pada sisi lain, bergantungnya isteri terhadap ekonomi dan alasan masih cinta sehingga isteri tetap ingin mempertahankan harmonisasi keluarga.

Fenomena KDRT semakin marak di kalangan keluarga sehingga menimbulkan persepsi masyarakat terhadap lahirnya UU PKDRT hanyalah simbol semata dan tidak berlaku secara efektif. Jalur lain yang ditempuh adalah dengan pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) sampai pada tingkat Kota/Kabupaten. Di sektor kepolisian pun sudah terbentuk unit sendiri yang khusus melayani kasus perempuan dan anak (unit PPA). Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini cukup urgen untuk ditangani sehingga harus membentuk lembaga tersendiri yang berfungsi sebagai lembaga konseling untuk merehabilitasi mental yang sudah tidak stabil lagi.

Peneliti mengangkat judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi penting, yaitu untuk menguak faktor yang menjadi sebab terjadinya KDRT sekaligus mensosialisasikan lewat publikasi hasil penelitian ini nantinya kepada masyarakat bahwa kasus KDRT di Kota Bima harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun *stakeholder* lainnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹. Termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UUPKDRT adalah:

¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada

Selanjutnya pada pasal 3 UU PKDRT dikemukakan Asas Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yang meliputi:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Lahirnya UUPKDRT memiliki tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak sehingga yang menjadi tujuan dari Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²

Di Bima khususnya, mempresepsikan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebatas kekerasan pada fisik. Tetapi bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dirincikan dalam UUPKDRT adalah:

- a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu yang meliputi:
 - Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

² Pasal 4 UUPKDRT

- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Budaya Patriarki

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yakni *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi akal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebudayaan adalah: Hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Pada tingkatan tertentu, budaya dapat dipahami sebagai cara hidup seseorang atau sekelompok orang. Clifford Geertz menyatakan bahwa budaya dapat dipahami sebagai pola makna yang tertanam dalam simbol dan ditransmisikan secara historis, sebuah sistem konsepsi turunan yang diekspresikan dalam bentuk simbolik yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi, bertahan hidup dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang hidup dan sikap terhadapnya.³

Budaya patriarki adalah sistem nilai yang mengagungkan laki-laki daripada perempuan. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak dan harta benda. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Kebanyakan sistem patriarki juga adalah patrilineal. Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminisitas.⁴

Oleh sejarawan terkenal John Tosh, patriarki dijabarkan sebagai sebuah konsep di mana kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum perempuan baik dalam level fisik maupun sosial. Dengan begitu, kepentingan kaum perempuan terabaikan. Patriarki dilihat oleh kaum feminis bukan sebagai sebuah penjelasan terhadap terjadinya bentuk penindasan atas kaum

³ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-dasar Konseling: Tinjauan dan Praktik*, (Bandung: Perdana Publishing, 2010) hal.102.

⁴ <http://www.wikipedia.org>

perempuan, namun lebih sebagai sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya bentuk penindasan tersebut.⁵

Data Perceraian dan Data KDRT di Bima

Sebagai acuan awal untuk mengetahui faktor-faktor KDRT di Bima, akan diuraikan data perceraian di Bima dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Dimana faktor perceraian tersebut menjadi bagian dari faktor KDRT.

Table 1

No	Jenis Perceraian	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Perkara diterima	Perkara diputus	Perkara diterima	Perkara diputus
1	Cerai Gugat	1158	972	1208	1043
2	Cerai Talak	378	327	386	326
TOTAL		1536	1299	1594	1369

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bima

Table 2

No	Tahun	Resort Bima	Resort Kota*
1	2014	942	113
2	2015	968	
Jumlah		1910	113

Sumber: Laporan Tahunan Resort Kota dan Kabupaten Bima

Mengacu pada data table di atas terlihat bahwa kasus KDRT di kabupaten Bima lebih banyak dan meningkat daripada di Kota Bima. Sedangkan data KDRT pada Kota Bima dalam kurun waktu dua tahun tersebut hanya 17% dari data yang ada di kabupaten Bima. Data di Resort Kota Bima merupakan data yang hanya yang dialporkan di unit PPA Resort Kota Bima sehingga terlihat sedikit. Sedangkan data di kabupaten Bima merupakan kumpulan dari data yang ada di seluruh polsek yang ada di kabupaten Bima. Antara data pada 2 (dua) table di atas bisa korelasikan bahwa kasus cerai pada kurun waktu dua tahun tersebut hanya 645 keluarga atau 4,1 % yang cerai bukan karena KDRT. Ini menandakan bahwa KDRT mendominasi faktor perceraian di Bima

Faktor-faktor KDRT

Berdasarkan pada dictum Undang-undang nomor 23 tahun 2004 bahwa bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. meliputi kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau

⁵ Mina Elfira, "Maskulinitas Dalam Vasilisa Maligina", dalam Wacana Vol. 10 No.1 April 2008, hal.42.

penderitaan psikis berat pada seseorang; Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan para informan dan responden.

1. Penelantaran Rumah Tangga (ekonomi)

Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Bima bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama persentasenya lebih banyak yang disebabkan oleh penelantaran rumah tangga. Diantaranya adalah suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga istri mau tidak mau harus membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, tingkat pendidikan dan keterampilan seorang suami yang rendah dan kurang sehingga menyebabkan mereka tidak mampu berkompetisi dengan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki keterampilan yang ahli.

2. Kekerasan Fisik

Kekerasan dalam rumah tangga dalam paradigma masyarakat khususnya masyarakat Bima adalah kekerasan fisik. Pun dalam realita di masyarakat, kekerasan fisik ini rentan terjadi baik pada istri maupun anak.

Analisis faktor-faktor KDRT terhadap Budaya Patriarki

a. Faktor Agama

Agama Islam tidak hanya mengatur pada wilayah ritual ibadah saja melainkan mengatur juga pada ranah hubungan dengan manusia baik itu yang berhubungan dengan muamalah, politik, sosial maupun dalam hal pengaturan rumah tangga pun telah diatur begitu rapi dan eksplisit.

Berdasarkan hasil kasus penelitian yang terjadi di Bima bahwa rentannya faktor kekerasan rumah tangga itu terjadi yaitu akibat kekerasan yang menimbulkan bekas secara fisik/luka, hal ini kemudian yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena sifat patriarki seorang laki-laki (suami) dalam mengatur rumah tangga terkadang dimanfaatkan secara fisik untuk

menunjukkan superioritas terhadap wanita (istri), secara implisit diantara hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya ialah tidak memukul wajah istrinya, meski terjadi perselisihan yang sangat dahsyat. sebagaimana firman allah yang artinya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah melebihkan sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz⁶, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar” (An-Nisaa’: 34).

Dalam artian bahwa suami tidak melampaui batas yang sudah diatur dalam hukum positif yang melindungi kaum rentan (anak-anak, wanita, lansia dll) seperti yang dijelaskan di ayat 3 pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang perlindungan HAM, maupun dalam hukum agama, dalam ayat diatas, Allah membolehkan seorang suami memukul istrinya, akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang bolehnya memukul adalah harus terpenuhinya kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Setelah dinasehati, dipisahkan tempat tidurnya, namun tetap tidak mau kembali ke syari’at Islam
2. Tidak diperbolehkan memukul wajahnya.
3. Tidak boleh memukul dengan pukulan yang menimbulkan bekas atau membahayakan istrinya.

Pukulannya pun pukulan yang tidak melukai, sebagaimana sabda Rasulullah wa sallam :” dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai”⁷

b. Faktor Sosial Budaya

Budaya patriarki yang telah menjadi primordialitas masyarakat Bima telah mengakar yaitu posisi laki-laki menjadi pemimpin untuk rumah tangga dan bahkan mampu mengendalikan/mengontrol kehidupan wanita dan tugas wanita menjunjung tinggi kehormatan kaum laki-laki (suami) dan ini

⁶Nusyuz yaitu meninggalkan kewajibannya selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami

⁷Hadist shahih diriwayatkan oleh muslim (no.1218 (147)), dari sahabat Jabir Bin Abdillah Radhiyallaahu’anhuma

menjadi sebuah budaya yang mengakar bahwa wanita (istri) harus mengakui keberadanya menjadi istri sebagai subordinat atas superioritas yang tercermin dalam nilai, moral serta perilaku wanita (istri) di Bima untuk menghargai posisi sebagai laki-laki (suami), paradigma yang sudah tertanam dalam pikiran masyarakat ini terkadang dimanfaatkan beberapa oknum (laki-laki), sehingga wanita (istri) selalu ditekan dan diperlakukan diluar batas tanpa mampu memberikan perlawanan, alhasil wanita (istri) menjadi korban dari ketertindasan dengan menjunjung tinggi sifat patriarki.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pun menjadi pemicu tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga akibat tidak seimbangnya kebutuhan dalam memenuhi sandang maupun pangan sehingga berdampak pada penelantaran rumah tangga, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 pasal 5 Jo 9 yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Di bima justru perempuan (istri) ikut membantu mencari nafkah melalui profesi maupun *skill* yang dimiliki, terkadang laki-laki (suami) menikmati dan menjadi apatis terhadap kewajiban yang diemban dalam membangun rumah tangga dari ketidak seimbangan dalam hal ekonomi ini pula lah yang menjadi pemicu cerai gugat terbanyak dibandingkan dengan cerai talak, dalam berumah tangga perlu bahu membahu untuk menciptakan sebuah keharmonisan tanpa membebankan hak dan kewajiban kepada pasangan yang seharusnya tidak mengemban hak dan kewajiban dari pasangan lain.

Simpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor KDRT terjadi di kota bima adalah sebagai berikut.

1. Penelantaran rumah tangga (ekonomi).

Maksudnya yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dengan mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai laki-laki (suami) terhadap wanita (istri) seperti memenuhi kebutuhan kehidupan dengan cara mencari nafkah, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik bisa saja terjadi salah satunya adalah berawal dari masalah ekonomi sehingga rumah tangga tidak harmonis sehingga dengan mengunggulkan superioritas terhadap subordinitas dapat

menimbulkan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

Daftar Pustaka

- Ali, Zaidin, 2010. *Pengantar Keperawatan Keluarga*, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Bakar M. Luddin, Abu, 2010. *Dasar-dasar Konseling: Tinjauan dan Praktik*, Perdana Publishing: Bandung.
- D. Gunarsa, Singgih, 1991. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Efendi, Ferry dkk, 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik Dalam Keperawatan*, Salemba Medika: Jakarta.
- Efendy, Nasrul, 2010. *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, EGC: Jakarta.
- Effendy, Nasrul, 2009. *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Elfira, Mina, "Maskulinitas Dalam Vasilisa Maligina", dalam *Wacana* Vol. 10 No.1 April 2008.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Gulo, W., 2010. *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo: Jakarta.
- Ihromi, T.O., 1999. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Lestari, Sri, 2011. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana: Jakarta.
- Raco, J.R. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT Grasindo: Jakarta.
- Saptomo, Ade, 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo: Jakarta.
- Sarwono, Jonathan, 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, Alfabeta: Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Suhendi, Hendi dan Wahyu, Ramdani, 2007. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia: Bandung.
- Suprajitno, 2004. *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Sutardi, Tedi, 2002. *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*, PT Grafindo Media Pratama: Jakarta.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Grasindo: Jakarta.
- Waluya, Bagja, 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT Setia Purna Inves: Bandung.

Waluya, Bagja, 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial*, PT. Setia Purna Inves: Jakarta.
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)